

PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK) WILAYAH I PROVINSI RIAU

Oleh : Brian Aredo Malau
Pembimbing : Mayarni, S.Sos. M.Si
Email : brianaredo12@gmail.com
CP : 085264302371

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761)
63277

Abstrack

Vocation training program by Vocation Training Technical Organizer (UPT-LK) Unit Region I Riau Province is a program with a purpose to train workers to be competent, productive, and resourceful through different kinds of courses available for job seekers and unemployed. This training program is centered in Pekanbaru and has been ongoing since 1983, but the implementation is having a number of problems and obstacles. The purpose of this research is to analyze the implementation of the training program and the factors that influence it.

Theory used in this research is training components theory by Moekijat which are training participants, instructors, time, training materials and methods. This research used descriptive qualitative method, and data collecting methods are observation, interviews, and documentation.

Keywords: Implementation, Program, Vocation Training

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pencapaian tujuan tersebut. Sesuai dengan peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan ketenagakerjaan.

Kualitas tenaga kerja yang rendah disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Angka ketenagakerjaan di Provinsi Riau mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Masalah yang ada pada ketenagakerjaan saat ini adalah jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga angka pengangguran di Provinsi Riau masih cukup besar. Tingginya angka pencari kerja dan juga tingkat kompetisi pencarian kerja untuk bersaing pada setiap bidang pekerjaan yang

ada mengharuskan setiap pencari kerja memiliki kemampuan yang berkualitas dan mumpuni di setiap bidangnya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa untuk dapat mengatasi kurangnya keterampilan tenaga kerja Indonesia, pemerintah membuat ketentuan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja terdapat pada Bab V Pasal 9 adalah sebagai berikut "pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan".

Kurangnya keterampilan tenaga kerja di Provinsi Riau sangatlah banyak, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan, oleh karena itu salah satu cara mengatasinya adalah dengan pelatihan tenaga kerja. Untuk mengurangi para pencari kerja yang kekurangan keterampilan, maka peran pemerintah adalah penting disini. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dari dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau. Dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Riau harus bisa menjalankan fungsinya sebagai instansi yang berkaitan dengan pelatihan kerja bagi setiap tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau. Maka sebagai pemerintah harus memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa di kemudian hari tidak hanya mengharapkan lapangan kerja yang tersedia tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna mencapai produktifitas dan kesejahteraan.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau

pekerjaan. Program pelatihan kerja adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam hal angka ketenagakerjaan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Upaya yang dimaksud berdampak langsung bagi angkatan kerja yang ada untuk memperoleh keterampilan dasar sehingga mampu membangun pribadi maupun kelompok agar secara mandiri dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarganya atau masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Hal yang terjadi saat ini di Provinsi Riau adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak semuanya memperoleh keterampilan dan keahlian tertentu dari pendidikan formal. Banyak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak dapat karena tidak memiliki biaya, sehingga mereka pun tidak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu penyiapan tenaga kerja yang tepat dan terarah sangat diperlukan mengingat tantangan dunia kerja / dunia usaha saat ini penuh persaingan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, profesional dan berkompetensi. Dimana saat ini perusahaan bagi pencari kerja tidak hanya melihat ijazah pendidikan formal sebagai syarat dalam bekerja, tetapi juga keterampilan yang merupakan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan bidang kerja yang tersedia.

Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang terampil mendorong para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka. Pelatihan kerja merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau adalah Unit Pelatihan Teknis yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Unit Pelatihan ini memiliki tujuan supaya terwujudnya tenaga kerja

yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Dengan demikian, hadirnya pelatihan tersebut sebagai peran dari pemerintah untuk menjawab tantangan yang dihadapi dimasa mendatang dan masa sekarang adalah bagaimana menciptakan, membina dan memberdayakan tenaga kerja yang begitu banyak di Provinsi Riau. Maka Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan hal tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah I Provinsi Riau adalah unit pelatihan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana berpusatkan di kota Pekanbaru, dan terbagi atas tiga daerah jangkauan yaitu kabupaten Pelalawan, Siak dan Kuantan Singingi. Adapun misi yang dikerjakan oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja global.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja global.
3. Membangun jaringan kerja (networking) di bidang pelatihan pada lembaga pelatihan lainnya.
4. Mengembangkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
5. Menyelenggarakan pelatihan instruktur.

Pelatihan yang dilakukan bersifat pengembangan diri dengan metode pelatihan banyak praktek dari pada teori (*Training By Doing*) dengan perbandingan persentase 70 untuk praktek dan 30 untuk teorinya. Hadirnya UPT-LK Wilayah I ini merupakan pelatihan dasar keterampilan di berbagai jenis bidang keterampilan yang nantinya melalui pelatihan ini setiap pesertanya mengalami pengembangan dan mempunyai keterampilan yang siap pakai di dunia pekerjaan.

Adapun kesembilan kejuruan tersebut juga mempunyai bagian masing-masing, yaitu:

1. Teknologi Mekanik terdiri dari mesin bubut dan frais, las listrik dan las karbit.
2. Listrik terdiri dari penerangan, instalasi tenaga, menggulung, refrigeranator, televisi, radio tape/vcd/amplifier, audio visual, elektronika komunikasi, dan teknisi handphone.
3. Otomotif terdiri dari mobil bensin, mobil diesel, dan sepeda motor.
4. Bangunan terdiri dari bangunan kayu, bangunan batu, konstruksi beton dan meubeler.
5. Tata Niaga terdiri dari sekretaris kantor, administrasi kantor, pembukuan/akuntansi, bahasa inggris.
6. Aneka Kejuruan terdiri dari menjahit, bordir, tata rias.
7. Pertanian terdiri dari hortikultura, processing, peternakan dan perikanan.
8. Teknologi Informatika terdiri dari operator komputer, teknisi komputer, dan desain grafis.
9. Pariwisata terdiri dari tata boga.

Program pelatihan kerja akan dapat berjalan atau dilaksanakan dengan baik apabila dilandasi dengan adanya perencanaan yang baik pula. Sebagai penyelenggara UPT-LK Wilayah I melaksanakan program pelatihan terlebih dahulu dengan melakukan persiapan pelatihan. Dalam tahap ini masyarakat pencari kerja diberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan UPT-LK Wilayah I. Adapun sumber dana pelatihan pada UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau adalah berasal dari dua jenis anggaran yaitu APBN dan APBD. Jenis APBN dan APBD Institusional adalah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan pada unit pusat Wilayah I yang terletak di Kota Pekanbaru dan untuk APBD Non-institusional adalah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan di

setiap kecamatan yang ada pada cakupan Wilayah I (Siak, Pelalawan dan Kuansing) dengan cara bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menggelar pelatihan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

Pada kenyataannya hasil yang diharapkan oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau dalam mengurangi jumlah pengangguran dan kemandirian untuk membuka usaha sendiri serta bisa berdaya saing di dunia pekerjaan melalui program pelatihan ini belum tercapai sepenuhnya. Fenomena yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kerja oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau adalah keterbatasan instruktur pelatihan, peralatan pelatihan yang sudah tua dan perlunya perbaikan serta penambahan pada teknologi yang maju saat ini, masih terdapat peralatan yang berusia 32 tahun lamanya sehingga kurang berfungsi dengan baik, gedung pelatihan (workshop) dan asrama peserta yang mengalami kerusakan fisik, peserta mengalami kendala dalam membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan ilmu yang telah diterima, peserta yang sudah dinyatakan lulus masih banyak yang belum mempunyai, peserta pelatihan belum sepenuhnya di sertifikasi dan direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi tenaga kerja.

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang diatas serta permasalahan yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan program pelatihan kerja yang dilakukan oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau pada tenaga kerja, pencari kerja dan pengangguran sehingga peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis-Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau”.

Pengertian pelaksanaan secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan, sedang pengertian secara istilah pelaksanaan adalah mengarahkan semua anggota agar mau bekerjasama dan

bekerja efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, pelaksanaan adalah satu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Nawawi (2009:95) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan karena pelaksanaan adalah bekerja untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari berbagai aktivitas, maka pemimpin mengambil tindakan-tindakan ke arah seperti kepemimpinan, perintah, komunikasi dan nasihat.

Webster dalam Wahab (2005:64) pelaksanaan atau implementasi secara pendek berarti penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jika dilihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian dan adanya hasil kegiatan.

Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2014:139) implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya.

Sujianto (2008:32) program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil. Sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Moekijat (2000:4) menyatakan bahwa suatu organisasi dalam menyelenggarakan pelatihan hendaknya memperhatikan komponen-komponen pelatihan berikut ini:

- a. Peserta pelatihan
- b. Instruktur pelatihan
- c. Waktu pelatihan
- d. Materi pelatihan
- e. Metode pelatihan

Pelaksana program pelatihan kerja dalam hal ini adalah UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau dalam pelaksanaan program pelatihan kerja dilihat dari beberapa komponen yang berkaitan, yaitu:

1. Peserta pelatihan adalah salah satu unsur dalam pelatihan yang merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan program pelatihan kerja karena dalam pelaksanaan ada objek yang harus diperlengkapi dalam pencapaian tujuan program.
2. Instruktur pelatihan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pelatihan yang memahami kondisi dalam menjalankan pelatihan kerja.
3. Waktu pelatihan adalah inti dari pelaksanaan pelatihan karena didalamnya berlangsung proses transformasi materi pelatihan dari

instruktur kepada peserta pelatihan kerja .

4. Materi pelatihan yaitu bahan yang akan disampaikan pada saat proses pelatihan berlangsung berupa teori dan praktek.
5. Metode pelatihan yaitu cara yang digunakan untuk menentukan bagaimana materi akan disampaikan nantinya ketika pelatihan berlangsung guna mencapai tujuan pelaksanaan program pelatihan kerja.

METODE

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder, penulis mempergunakan teknik deskriptif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif.

HASIL

A. Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau

Pelatihan kerja disediakan akibat dari kurangnya keterampilan tenaga kerja di Provinsi Riau. Untuk mengurangi para pencari kerja yang kekurangan keterampilan, maka peran pemerintah adalah penting disini. Oleh karena itu penyiapan tenaga kerja yang tepat dan terarah sangat diperlukan mengingat tantangan dunia kerja saat ini penuh persaingan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibutuhkan

tenaga kerja yang terampil, profesional dan berkompetensi.

Pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau adalah salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang mencari kerja dan ingin meningkatkan serta mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat memperoleh keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri (mandiri).

1. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah kumpulan beberapa orang yang bertujuan untuk dididik/diajarkan dalam melaksanakan suatu program. Suatu pelatihan tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada peserta yang mengikuti kegiatan atau pelatihan tersebut. Oleh karena itu peserta pelatihan merupakan unsur penting dalam melaksanakan suatu program pelatihan karena sasaran dari suatu program itu adalah orang yang melaksanakan program itu sendiri. Pihak UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau dalam merekrut calon peserta pelatihan memiliki standar berdasarkan anggaran yang di terima dari APBN dan APBD sehingga menentukan jumlah dari peserta setiap tahunnya. Sasaran dari peserta pelatihan di UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau adalah masyarakat yang pengangguran dan pencari kerja bukan yang sedang belajar atau menempuh sekolah. Pihak UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau juga memberikan beberapa persyaratan dan juga proses seleksi melalui ujian tertulis dan wawancara. Peserta pelatihan mendapatkan pemberitahuan mengenai program pelatihan kerja UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau dari media sosial, pamflet yang tersebar, dan penyebaran melalui orang yang mengetahui adanya program pelatihan.

Bagi para peserta pelatihan yang sudah mendaftar maka calon peserta pelatihan wajib mengikuti tes tertulis dan wawancara sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti pelatihan. Hal ini berguna untuk

melihat apakah sasaran yang ditentukan UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau sudah tepat untuk mengikuti program pelatihan kerja tersebut. Peserta pelatihan yang telah mengikuti program pelatihan kerja di UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau tentunya akan menghadapi dunia pekerjaan. Dengan menyelesaikan pelatihan dan memiliki keterampilan diharapkan para peserta mampu mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri melalui keterampilan yang didapatkan ketika mengikuti pelatihan.

2. Instruktur Pelatihan

Instruktur berperan penting dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. Berhasil atau tidaknya suatu pelatihan akan tergantung pada kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi, baik teori maupun praktek. Instruktur yang diminta dalam pelaksanaan program pelatihan ini adalah instruktur yang handal dalam menyampaikan materi, instruktur yang mampu menjalin kerja sama dan menjaga hubungan emosional yang baik dengan peserta pelatihan sehingga pelaksanaan program pelatihan kerja berjalan dengan baik. Instruktur pelatihan yang ada di UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pelatihan masing-masing yang sudah dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu oleh asisten instruktur yang mendapatkan pendidikan di bidangnya masing-masing terlebih dahulu sebelum mereka sah sebagai asisten instruktur.

Oleh karena itu latar belakang pendidikan dan pengalaman dari setiap instruktur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja di UPT-LK pada berbagai jenis bidang dan jurusan yang ada. Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh dengan bidang pelatihan masing-masing jurusan. UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau memiliki instruktur yang berpengalaman dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pelatihan dan di bantu oleh tenaga honor yaitu asisten pelatih yang

pada awalnya diberikan pendidikan dasar dan pelatihan di CEVEST (*Centre for Vocational and Extention Service Training*) Bekasi tentang bidang pelatihan dan keterampilan yang akan mereka kerjakan sebelum ditunjuk sebagai asisten instruktur yang sah.

3. Waktu Pelatihan

Waktu pelatihan merupakan proses pengenalan terhadap peserta untuk memahami dan mengidentifikasi program yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program pelatihan kerja dibutuhkan waktu untuk pengenalan materi pelatihan dan waktu untuk praktek langsung dalam pelatihan tersebut untuk melihat perkembangan kemampuan dari peserta dan pelaksanaan program. waktu yang digunakan untuk pelaksanaan program pelatihan kerja di UPT-LK adalah selama kurang lebih dua setengah bulan setiap tahunnya. Satu setengah bulan pertama adalah proses rekrutmen peserta pelatihan dan dua bulan sebagai waktu untuk pelatihan keterampilan dan waktu untuk magang bagi para peserta pelatihan di setiap jurusan yang ada. Pelatihan dilaksanakan pada hari kerja yaitu mulai hari senin sampai jumat pukul 08.00 s/d 16.45 WIB. Selama waktu pelatihan, peserta pelatihan akan diberikan materi sesuai dengan jurusan dengan kurikulum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.

4. Materi Pelatihan

Materi pelatihan adalah hal-hal mengenai pokok permasalahan yang dipedomani sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah dalam melaksanakan suatu program. Dalam pelaksanaan pelatihan kerja UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau, materi yang diberikan dapat berupa materi teori dan praktek. Materi pelatihan ini adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan program pelatihan. Karena apabila tidak ada materi dari instruktur pelatihan, maka peserta pelatihan tidak akan mendapatkan

keterampilan setelah melaksanakan pelatihan tersebut. Materi pelatihan disampaikan oleh instruktur dan asisten instruktur melalui ceramah dan dialog langsung di dalam kelas atau workshop. Materi pelatihan sebelumnya telah dibentuk dalam silabus pelatihan supaya ukuran dalam memberikan materi dapat ditentukan sesuai dengan waktu pelatihan. Materi yang berbentuk teori disampaikan oleh instruktur sendiri dan untuk materi praktek disampaikan oleh minimal dua orang yaitu instruktur dan asisten instruktur.

Sebelum menyampaikan materi pelatihan, pihak dari UPT-LK membentuk silabus pelatihan yang akan menjadi standar materi kepada setiap peserta di jurusan masing-masing. Materi yang diberikan saat pelatihan yaitu teori untuk pengetahuan mendasar dan praktek untuk mengaplikasikannya. Sebagian besar peserta pelatihan menanggapi dengan baik selama materi pelatihan disampaikan dan sebagian besar peserta lebih suka dengan materi praktek karena bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat saat pelatihan. Namun masih ada kendala di beberapa jurusan disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menunjang materi praktek yang diberikan.

5. Metode Pelatihan

Metode pelatihan adalah suatu cara atau jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pekerjaan atau keahlian sumber daya manusia atau peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau akan menyusun cara atau metode dalam proses pelaksanaan pelatihan kerja tersebut. UPT-LK telah menentukan jumlah perbandingan sesuai dengan kebijakan yang ada, materi teori sebesar 30 persen dan 70 persen untuk praktek sebagai metode pelatihannya yang akan dilakukan bersama seluruh peserta pelatihan di setiap jurusan.

Pelaksanaan pelatihan kerja oleh instruktur dan asisten instruktur

menggunakan metode dengan perbandingan yang telah disusun dalam kurikulum UPT-LK sendiri. Awal pelatihan digunakan untuk memberikan teori-teori dasar pelatihan lalu diikuti dengan praktek oleh setiap peserta pelatihan. Metode instruktur dalam pelatihan menggunakan satu orang instruktur saja dalam menyampaikan teori dan untuk praktek instruktur dan asisten bekerja sama dalam melakukannya. Materi praktek di berikan lebih banyak karena diharapkan peserta pelatihan setelah lulusnya siap bersaing dan bekerja dengan keterampilan yang didapatkan pada pelatihan ini. Peserta sepakat dengan metode yang dijalankan karena sesuai dengan tujuan mereka untuk mendapatkan keterampilan langsung dengan mempraktekannya. Sebelum pelatihan selesai, para peserta pelatihan diberikan ujian akhir tertulis dan ujian praktek untuk mengukur seberapa kemampuan peserta selama mengikuti pelatihan.

PEMBAHASAN

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau

Program pelatihan kerja oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau sudah terlaksana setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut didukung oleh beberapa komponen yang sesuai dengan visi dan misi program pelatihan sehingga dapat berjalan. Pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan program pelatihan dan beberapa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang memengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja atau unit organisasi sehingga

organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan. Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Koordinasi yang terjalin antara UPT-LK Wilayah I dengan lembaga pemerintahan adalah dalam hal pengadaan instruktur dan asisten instruktur pelatihan. Koordinasi yang sudah lama terjalin dengan Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah Provinsi Riau untuk instruktur yang sudah senior dan koordinasi dengan lembaga Balai Besar Latihan Kerja CEVEST (*Centre for Vocational and Extention Service Training*) di Bekasi dalam hal pendidikan dasar dan pelatihan calon asisten instruktur. Koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Riau menurut tugas pokok dan fungsinya UPT-LK sebagai pembentukan tenaga kerja dengan keterampilan melalui program pelatihan kerja yang dijalankan dan Disnakertrans sebagai lembaga yang membentuk dan mengeluarkan keputusan kepada UPT-LK bertanggung jawab untuk menerima usulan bentuk program dan dilakukan proses seleksi melalui bina program dan akan mengeluarkan keputusan menurut skala prioritas dan dana yang tersedia.

Koordinasi dengan Disnakertrans sampai kepada pasca pelatihan yang telah selesai dilakukan, Dinas akan memberikan informasi melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja dengan program yang bernama bursa tenaga kerja. Informasi tersebut berguna untuk membuka kesempatan para peserta yang telah lulus di UPT-LK untuk bersaing mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak UPT-LK dalam pelaksanaan program pelatihan bukan hanya dengan lembaga pemerintahan akan tetapi bersama dengan

lembaga lain seperti perusahaan dan lainnya.

Pihak UPT-LK berkoordinasi dengan perusahaan yang ada dengan mengirim surat rekomendasi peserta pelatihan yang telah lulus untuk di izinkan magang di perusahaan tersebut. Peserta yang diterima magang di salah satu perhotelan mengaku bahwa UPT-LK menyediakan tempat untuk magang bagi para peserta pelatihan, namun hanya sampai pada magang saja dan tidak ditempatkan sebagai pekerja tetap.

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program pelatihan kerja oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana yang dimiliki UPT-LK tersebut akan mempengaruhi pada pelaksanaan program pelatihan kerja terutama dari segi kelengkapan dan kelayakan pakai. Sarana dan prasarana yang ada harus dapat mendukung pelaksanaan program pelatihan kerja. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau terbilang sudah lengkap dan memadai namun masih perlu ada peningkatan di beberapa sarana dan prasarana yang semakin tua. Keterbatasan dana dari pemerintah yang menjadikan peralatan yang sudah tua dan tidak sesuai dengan zaman harus tetap digunakan. Untuk sarana dan prasarana tempat pelatihan setiap jurusan disediakan masing-masing satu gedung yang biasa disebut workshop. Workshop tersebut sudah diisi dengan ruangan-ruangan yang memudahkan proses pelaksanaan pelatihan baik itu bagi para peserta dan instruktur pelatihan itu sendiri.

Sarana dan prasarana yang tersedia di UPT-LK sudah mencukupi untuk pelaksanaan praktek peserta pelatihan di beberapa jurusan. Namun kondisi sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan akibat dari umur barang yang sudah tua dan sering di pakai namun tidak di perbaharui dengan segera, peralatan kurang modern sehingga ada batasan teori dan praktek yang tidak dapat dilaksanakan,

serta kurangnya jumlah dari peralatan yang layak digunakan untuk pelaksanaan praktek oleh para peserta pelatihan. Dari kondisi sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan pelaksanaan pelatihan kerja mengalami dampak yang tidak baik pada pelaksanaan pelatihan kerja khususnya bagi peserta pelatihan dan waktu pelatihan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penelitimengenaiPelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh hal-hal seperti peserta pelatihan sesuai dengan target sasaran yaitu para pencari kerja namun peserta yang telah diberikan pelatihan keterampilan, sertifikat dan magang tidak direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Instruktur pelatihan saat ini sudah memadai namun kondisi intruktur yang telah lama melatih akan segera pensiun sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang bisa disiapkan untuk instruktur pengganti dan status asisten pelatih masih sebagai tenaga honorer sehingga tidak dapat melatih sendiri. Waktu pelatihan sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jurusan, namun masih terdapat kekurangan pada beberapa jurusan yang membutuhkan waktu lebih untuk mengikuti pelatihan sehingga target pencapaian dari peserta yang dilatih kurang maksimal.Materi pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, instruktur pelatihan memberikan meteri berupa teori dan praktek dengan begitu peserta pelatihan akan mudah memahami materi yang diterima. Namun pada beberapa jurusan, peserta pelatihan masih mengalami kekurangn dalam hal materi praktek disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga

pelaksanaan pelatihan menjadi kurang maksimal. Metode pelatihan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat sehingga pada pelaksanaannya metode dengan perbandingan pemberian materi teori dan praktek yang lebih dominan adalah praktek. Metode ini berjalan baik namun untuk pelaksanaan materi praktek masih terkendala dengan sarana dan prasarana.

Pada pelaksanaan program pelatihan kerja oleh UPT-LK Wilayah I Provinsi Riau terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Koordinasi yang kurang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai penyaluran peserta pelatihan yang telah lulus ke dunia pekerjaan. Koordinasi dengan beberapa perusahaan yang masih sekedar kerjasama magang para peserta dan setiap peserta tidak sampai menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut.
2. Sarana dan prasarana cukup memadai namun masih terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan pelatihan sudah tua sehingga dibutuhkan perbaikan dan penggantian karena kondisinya yang rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam pelaksanaan pelatihan bagi peserta.

SARAN

Berdasarkan kendala yang terjadi pada Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Provinsi Riau, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pengangguran setelah peserta pelatihan lulus dari program pelatihan dan telah menerima sertifikat direkomendasikan ke perusahaan

untuk menjadi tenaga kerja bukan sekedar magang saja.

2. Untuk mengatasi kekurangan instruktur sebaiknya asisten instruktur yang sudah lama melatih dan dianggap berpengalaman sesuai standar instruktur diangkat menjadi PNS atau tenaga tetap sehingga bisa menggantikan instruktur yang akan pensiun.
3. Untuk waktu pelatihan yang masih kurang sesuai diharapkan bisa diatur kembali dan disesuaikan dengan waktu standar bagi masing-masing jurusan mendapatkan hasil pelatihan yang maksimal.
4. Untuk materi dan metode yang disampaikan bisa lebih baik lagi dan lebih bervariasi cara penyampaiannya kepada peserta sehingga para peserta mempunyai daya serap yang baik.
5. Koordinasi antara UPT-LK dengan Disnakertrans dijalin dengan lebih baik lagi, dalam hal program yang akan dilaksanakan, dana dan anggaran yang tersedia, serta informasi yang bisa membantu peserta pelatihan dalam pencarian kerja sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.
6. Sarana dan prasarana perlu di perbaiki bila sudah rusak, ditambah bila ada yang kurang, dan diganti dengan yang baru dan terkini bila ada yang sudah tidak layak pakai dan sudah ketinggalan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Moh. 2004. *Psikologi Industri*. Yogyakarta.
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen II*. Yogyakarta: BPFE.

- Hasibuan, H. Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM
- Moekijat. 2000. *Latihan dan Pengembangan Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar'Ruzz Media.
- Namawi, Ismail 2007. *Public Policy*. Surabaya: PMN
- Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM.
- Nitisemito, Alex S. 2000. *Latihan dan Pengembangan Pegawai*. Bandung.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep Teori dan Praktik"*. Riau: Alfabeta.
- Suyanto, M. 2007. *Strategic Management Global*. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.R. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Press